



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

LAPORAN

KEUANGAN

TAHUNAN 2025

(UNAUDITED)

Bagian Anggaran
005.01.401112



021-869023130
keuangan.ptajakarta2013@gmail.com
www.pta-jakarta.go.id



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2025

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

**Jl. Radin Inten II No.3 Duren Sawit
Jakarta Timur - DKI Jakarta 13440
Telp. 86902313 Fax. 86902314
e-mail : keuangan.ptajakarta2013@gmail.com**

KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta, 15 Pebruari 2025

Plt. Sekretaris

Wahida Muslihah, S.Sos, M.M.

NIP.197803272002122001



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan Laporan	iv
I Laporan Realisasi Anggaran	1
II Neraca	2
III Laporan Operasional	3
IV Laporan Perubahan Ekuitas	5
V Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	5
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis	
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
A.3 Basis Akuntansi	
A.4 Dasar Pengukuran	
A.5 Kebijakan Akuntansi	
B. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	10
B.1 Pendapatan	
B.1.2 Penerimaan Pajak	
B.1.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak	
B.2 Belanja	
B.2.1 Belanja Pegawai	
B.2.2 Belanja Barang	
B.2.3 Belanja Modal	
B.2.4 Belanja Bantuan Sosial	
B.2.5 Catatan Penting Lainnya Laporan Realisasi Anggaran	
B.3 Rincian Output	
C. Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca	20
C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	
C.2 Kas di Bendahara Penerimaan	
C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas	
C.4 Beban Dibayar Dimuka (prepaid)	
C.5 Pendapatan yang Masih Harus Diterima	
C.6 Piutang Bukan Pajak	
C.7 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	
C.8 Persediaan	
C.10 Tanah	
C.11 Peralatan dan Mesin	
C.12 Gedung dan Bangunan	
C.13 Jalan, Irigasi dan Jaringan	
C.14 Aset Tetap Lainnya	
C.15 Aset Tak Berwujud	
C.16 Aset Lain-lain	
C.17 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	
C.18 Utang kepada Pihak Ketiga	
C.19 Utang Yang Belum Ditagihkan	
C.20 Ekuitas	
D. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	27
D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak	
D.2 Beban Pegawai	
D.3 Beban Persediaan	
D.4 Beban Barang dan Jasa	
D.5 Beban Pemeliharaan	

D.6	Beban Perjalanan Dinas	
D.7	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	
D.8	Beban Bantuan Sosial	
D.9	Beban Penyusutan dan Amortisasi	
D.10	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	
D.11	Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	
D.12	Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
D.13	Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	
D.14	Pos Luar Biasa	
D.15	Catatan Penting Lainnya Laporan Operasional	
E.	Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	32
E.1	Ekuitas Awal	
E.2	Surplus (Defisit) LO	
E.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	
E.4	Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	
E.5	Transaksi Antar Entitas	
E.6	Ekuitas Akhir	
F.	Pengungkapan Penting Lainnya Ekuitas	35
VI.	Lampiran dan Daftar	

PERYATAAN TANGGUNG JAWAB

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.



Jakarta, 15 Pebruari 2025

Plt. Sekretaris

Wahida Muslihah, S.Sos, M.M.

NIP. 197803272002122001

RINGKASAN

RINGKASAN LAPORAN

Laporan Keuangan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Keuangan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp18.344.298 berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp18.344.298 atau mencapai 122,80 persen dari estimasi Pendapatan LRA sebesar Rp14.938.000.

Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp25.132.591.877 atau mencapai 98,89 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp25.413.549.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada 31 Desember 2025 . Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp23.970.891.589 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp27.273.463; Piutang Jangka Panjang sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp23.943.618.126 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp3.090.348.225 dan Rp20.880.543.364

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp18.079.392 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp28.153.671.872 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional sebesar Rp-28.135.592.480, Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-28.135.592.480.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 sebesar Rp23.825.219.465, dikurangi Defisit-LO sebesar Rp-28.135.592.480 kemudian dikurangi dengan koreksi-koreksi sebesar 0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar 25.190.916.379 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp20.880.543.364

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan Atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis suatu nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CALK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan diajarkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual

I. LRA PERBANDINGAN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024**

URAIAN	Catatan	TA 2025		% thd Angg	TA 2024
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN DAN HIBAH	B.1				
Penerimaan Perpajakan	B.1.1	-	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.2	14.938.000	18.344.298	122,80	66.037.929
JUMLAH PENDAPATAN		14.938.000	18.344.298	122,80	66.037.929
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.2.1	21.347.167.000	21.076.655.442	98,73	16.905.535.828
Belanja Barang	B.2.2	3.738.132.000	3.727.836.435	99,72	4.050.140.672
Belanja Modal	B.2.3	328.250.000	328.100.000	99,95	-
Belanja Bantuan Sosial	B.2.4	-	-	-	-
JUMLAH BELANJA		25.413.549.000	25.132.591.877	98,89	20.955.676.500



Jakarta, 15 Pebruari 2025

Plt. Sekretaris

Wahida Muslihah, S.Sos, M.M.

NIP. 197803272002122001

II. NERACA

NERACA

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

URAIAN	Catatan	2025	2024
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	-	-
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.4	531.873	399.967
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.5	-	-
Piutang Bukan Pajak	C.6	-	264.906
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.7	-	(1.324)
Persediaan	C.8	26.741.590	3.959.240
Jumlah Aset Lancar		27.273.463	4.622.789
ASET TETAP			
Tanah	C.9	20.367.671.000	20.367.671.000
Peralatan dan Mesin	C.10	5.146.485.979	4.732.397.557
Gedung dan Bangunan	C.11	3.514.357.416	3.514.357.416
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.12	49.563.000	49.563.000
Aset Tetap Lainnya	C.13	236.830.863	236.830.863
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.14	(5.371.290.132)	(5.022.620.329)
Jumlah Aset Tetap		23.943.618.126	23.878.199.507
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.15	34.075.000	34.075.000
Aset Lain-lain	C.16	-	-
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.17	(34.075.000)	(34.075.000)
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		23.970.891.589	23.882.822.296
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.18	3.090.348.225	57.602.831
Utang Yang Belum Ditagihkan	C.19	-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		3.090.348.225	57.602.831
JUMLAH KEWAJIBAN		3.090.348.225	57.602.831
EKUITAS			
Ekuitas	C.20	20.880.543.364	23.825.219.465
JUMLAH EKUITAS		20.880.543.364	23.825.219.465
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		23.970.891.589	23.882.822.296

III. LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2025	2024
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Perpajakan	D.1	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.2	18.079.392	18.840.335
Jumlah Pendapatan		18.079.392	18.840.335
BEBAN			
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.3	24.088.794.030	16.901.902.750
Beban Persediaan	D.4	106.987.900	110.184.910
Beban Barang dan Jasa	D.5	2.590.609.069	2.857.181.786
Beban Pemeliharaan	D.6	968.889.016	957.900.545
Beban Perjalanan Dinas	D.7	59.043.000	124.621.590
Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	D.8	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.9	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.10	339.350.181	289.577.727
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.11	(1.324)	1.324
Jumlah Beban		28.153.671.872	21.241.370.632
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(28.135.592.480)	(21.222.530.297)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	D.12	-	45.437.500
Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	D.13	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.14	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		-	45.437.500
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa		(28.135.592.480)	(21.177.092.797)
Pos Luar Biasa	D.15		
Pendapatan PNPB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
-		-	-
SURPLUS/DEFISIT - LO		(28.135.592.480)	(21.177.092.797)

Jakarta, 15 Pebruari 2025

Plt. Sekretaris



Wahida Muslihah, S.Sos, M.M.

NIP. 197803272002122001

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Catatan	2025	2024
EKUITAS AWAL	E.1	23.825.219.465	24.085.193.691
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2	(28.135.592.480)	(21.177.092.797)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	E.3	-	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	-	-
Penyesuaian Nilai Aset	E.41	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	E.42	-	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.43	-	-
Selisih Revaluasi Aset	E.44	-	-
Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	E.45	-	-
Koreksi Lain-Lain	E.46	-	-
Jumlah		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	25.190.916.379	20.917.118.571
KENIAKAN/PENURUNAN EKUITAS		(2.944.676.101)	(259.974.226)
EKUITAS AKHIR	E.6	20.880.543.364	23.825.219.465



Jakarta, 15 Pebruari 2025

Plt. Sekretaris

Wahida Muslihah, S.Sos, M.M.

NIP. 197803272002122001

*V. CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN*

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis

Dasar hukum Entitas dan Rencana Strategis

A.1. Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 7 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
- 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014;
- 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
- 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
- 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
- 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
- 14 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi
- 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2023 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;

- 18 Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga;
- 19 Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
- 20 Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
- 21 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
- 22 Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1330/SEK/SK/XII/2022 mengenai Perubahan atas Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah menambah eksistensi dan kedudukan pengadilan agama dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu sudah menjadi tuntunan institusi bahwa pembinaan terhadap sumber daya manusia aparatur peradilan agama harus lebih diintensifkan lagi, namun di samping itu juga pemenuhan sarana prasarana dan anggaran yang memadai, dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung RI yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJM 4 (empat) sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025–2029.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Visi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut: **“TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA YANG AGUNG”**

Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang Agung bercirikan:

- 1 Pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif dan berkeadilan;
- 2 Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN
- 3 Adanya struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur;
- 4 Penyelenggaraan manajemen dan administrasi proses perkara secara sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional;
- 5 Mengelola sarana dan parasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan;
- 6 Pengelolaan dan pembinaan sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional;
- 7 Adanya pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi dan jalannya peradilan;
- 8 Berorientasi pada pelayanan publik yang prima;
- 9 Adanya manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas dan transparansi;
- 10 Pelaksanaan bisnis proses peradilan yang modern dengan berbasis TI terpadu;

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Agama Jakarta adalah sebagai berikut:

- 1 Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan;
- 2 Meningkatkan kualitas aparatur peradilan;
- 3 Meningkatkan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan;
- 4 Meningkatkan akses masyarakat terhadap peradilan.

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan periode 31 Desember 2025 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI atau Sistem Akuntansi Instansi saat ini sudah menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis web yaitu SAKTI. SAIBA dan SIMAK digantikan modul-modul yang ada di SAKTI yaitu kelompok modul pelaporan yang terdiri dari modul piutang, modul persediaan, modul aset dan modul GLP.

Basis Akuntansi

A.3 BASIS AKUNTANSI

Menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai proses historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 187/PB/2017 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar, terdapat perubahan akun-akun terutama pada akun pendapatan negara bukan pajak.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan / atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
 - b. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar**a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan.	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak Tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan.	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dinilai dengan menggunakan metode perhitungan First In First Out (FIFO). Dalam metode FIFO, persediaan yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai persediaan yang pertama kali keluar. Dengan demikian, nilai persediaan keluar dicatat sesuai dengan urutan (sequential) masuk persediaan. Penggunaan Metode Penilaian FIFO ini sesuai dengan PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan. Sebagaimana diatur dalam PMK 22/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat, dampak perubahan metode penilaian ini bersifat prospektif. Diterapkan untuk seluruh jenis persediaan (masing-masing persediaan per kode barang) dan seluruh jenis transaksi persediaan keluar.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapasitas sebagai berikut :
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapasitas tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklafikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN / BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Perhitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 Tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d. 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Penggolongan Masa manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tetap Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas, Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-Lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai normal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan telah melakukan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja, antara lain :

Uraian	2025	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Penerimaan Negara Bukan Pajak	14.938.000	14.938.000
Jumlah Pendapatan	14.938.000	14.938.000
Belanja		
Belanja Pegawai	21.214.926.000	21.347.167.000
Belanja Barang	4.211.837.000	3.738.132.000
Belanja Modal	178.250.000	328.250.000
Jumlah Belanja	25.605.013.000	25.413.549.000

Realisasi Pendapatan
Rp18.344.298

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp18.344.298 atau mencapai 122,80 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp14.938.000. Pendapatan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp0 dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp18.344.298. Pendapatan ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya Hal tersebut disebabkan karena Tidak Adanya Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin Tahun 2025, dan Hanya terdapat Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan tuis berupa sewa rumah dinas ketua, wakil ketua PTA Jakarta Dan Ketua beserta wakil ketua PA Jakarta Selatan. dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2025		%
	Anggaran	Realisasi	
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	14.938.000	18.344.298	122,80
Jumlah	14.938.000	18.344.298	122,80

Realisasi Penerimaan Pajak mengalami penurunan sebesar 0,00 persen dan Penerimaan Negara Bukan Pajak mengalami penurunan sebesar 72,22 persen dibanding tahun sebelumnya. Rincian pendapatan adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Penerimaan Negara Bukan Pajak	18.344.298	66.037.929	(72,22)
Jumlah	18.344.298	66.037.929	(72,22)

Realisasi Penerimaan Pajak Rp0

B.1.1 Penerimaan Pajak

Realisasi Penerimaan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penerimaan Pajak TA TA 2025 sebesar 0,00 dari TA 2024 .

Rincian Penerimaan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Pajak	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp18.344.298

B.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing- masing sebesar Rp18.344.298 dan Rp66.037.929. Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2025 mengalami penurunan sebesar 72,22 dari TA 2024 Hal tersebut disebabkan karena Tidak Adanya Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin Tahun 2025, dan Hanya terdapat Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan tusi berupa sewa rumah dinas ketua, wakil ketua PTA Jakarta Dan Ketua beserta wakil ketua PA Jakarta Selatan.. Rincian Penerimaan Negara Bukan Pajak adalah sebagai berikut :

Perbandingan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	18.344.298	66.037.929	(72,22)
Jumlah	18.344.298	66.037.929	(72,22)

Sedangkan Rincian PNBPN Lainnya adalah sebagai berikut :

Perbandingan Rincian PNBPN Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	18.575.429	(100,00)
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	47.462.500	(100,00)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	18.344.298	-	-
Jumlah	18.344.298	66.037.929	(72,22)

B.2 Belanja

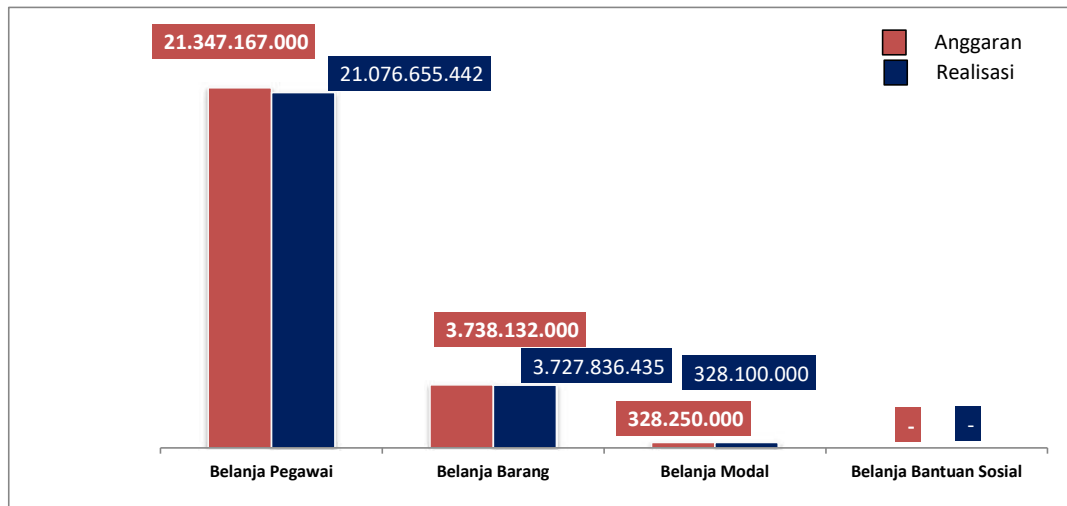
Realisasi Belanja pada TA 2025 adalah sebesar Rp25.132.591.877 atau 98,89 % dari anggaran belanja sebesar Rp.25.413.549.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2025

URAIAN	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025		
	Anggaran	Realisasi	% thdp Angg.
Belanja Pegawai	21.347.167.000	21.076.655.442	98,73
Belanja Barang	3.738.132.000	3.727.836.435	99,72
Belanja Modal	328.250.000	328.100.000	99,95
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	25.413.549.000	25.132.591.877	98,89

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:

Komposisi Anggaran dan Realisasi Tahun 2025



Dibandingkan dengan TA 2024, Realisasi Belanja TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 19,93% Hal ini disebabkan oleh banyaknya hakim dan panitera pengganti yang mutasi ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menyebabkan bertambahnya belanja pegawai atas pembayaran gaji dan tunjangan hakim. Berikut rincian realisasi belanja TA 2025 dan TA 2024.

Perbandingan Realisasi Belanja Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Pegawai	21.076.655.442	16.905.535.828	24,67
Belanja Barang	3.727.836.435	4.050.140.672	(7,96)
Belanja Modal	328.100.000	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	25.132.591.877	20.955.676.500	19,93

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp21.076.655.442 dan Rp16.905.535.828. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus sebagai PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 24,67 % dari TA 2024. Hal ini disebabkan Hal ini disebabkan oleh banyaknya hakim dan panitera pengganti yang mutasi ke Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menyebabkan bertambahnya belanja pegawai atas pembayaran gaji dan tunjangan hakim

Perbandingan Belanja Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Gaji Pokok PNS	5.706.687.960	5.434.810.080	5,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	62.392	62.383	0,01
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	398.618.910	390.662.410	2,04
Belanja Tunj. Anak PNS	83.557.240	75.573.106	10,56
Belanja Tunj. Struktural PNS	80.100.000	93.870.000	(14,67)
Belanja Tunj. Fungsional PNS	392.540.000	8.240.580.000	(95,24)
Belanja Tunj. PPh PNS	67.259.165	1.637.678.493	(95,89)
Belanja Tunj. Beras PNS	213.204.480	203.645.040	4,69
Belanja Uang Makan PNS	699.679.000	666.274.000	5,01
Belanja Tunjangan Umum PNS	33.945.000	34.540.000	(1,72)
Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	2.467.571.513	-	-
Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	10.685.400.000	-	-
Belanja Gaji Pokok PPPK	242.324.000	92.667.300	161,50
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.772	1.296	268,21
Belanja Tunj. Suami/ Istri PPPK	12.150.480	1.578.090	669,95
Belanja Tunj. Anak PPPK	3.914.076	-	-
Belanja Tunj. Fungsional PPPK	14.462.000	15.002.000	(3,60)
Belanja Tunj. Beras PPPK	15.497.880	2.462.280	529,41
Belanja Uang Makan PPPK	47.393.000	16.132.000	193,78
Belanja Tunj. Umum PPPK	10.800.000	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja kotor	21.175.171.868	16.905.538.478	25,26
Pengembalian Belanja Pegawai	98.516.426	2.650	3.717.500,98
Jumlah Belanja	21.076.655.442	16.905.535.828	24,67

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.727.836.435 dan Rp4.050.140.672. Belanja Barang adalah pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Realisasi Belanja Barang TA 2025 mengalami penurunan sebesar 7,96% dari Realisasi TA 2024.

Hal ini antara lain disebabkan oleh Adanya pengurangan pagu belanja barang

Perbandingan Belanja Barang Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Barang Operasional	1.412.044.206	1.697.329.633	(16,81)
Belanja Barang Non Operasional	968.100	2.251.000	(56,99)
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	133.759.750	114.447.875	16,87
Belanja Jasa	1.157.121.863	1.163.419.329	(0,54)
Belanja Pemeliharaan	964.899.516	953.093.245	1,24
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	59.043.000	124.621.590	(52,62)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	3.727.836.435	4.055.162.672	(8,07)
Pengembalian Belanja	-	5.022.000	(100,00)
Jumlah Belanja	3.727.836.435	4.050.140.672	(7,96)

Realisasi Belanja Modal Rp328.100.000 **B.2.3 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp328.100.000 dan Rp0. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada TA 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,00% dibandingkan TA 2024 disebabkan oleh Kenaikan Belanja Modal disebabkan karna adanya pembelian peralatan dan mesin .

Perbandingan Belanja Modal Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	328.100.000	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	328.100.000	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	328.100.000	-	-

Realisasi Belanja Modal Tanah Rp0 **B. 2.3.1 Belanja Modal Tanah**

Realisasi Belanja Modal Tanah per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan TA 2024 . Hal ini disebabkan oleh Karena Tidak Ada Belanja Modal Tanah untuk Tahun 2025.

Perbandingan Belanja Modal Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp0 **B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, mengalami kenaikan sebesar 0,00 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan oleh Kenaikan Belanja modal Peralatan dan mesin berupa Pembeli AC sebanyak 15 Unit, dan Merupakan Anggaran Belanja Tambahan Pada Bulan Desember 2025 berupa pengadaan Sound System sebanyak 1 Unit, Camera Conference sebanyak 1 Unit dan P.C Unit sebanyak 1 Unit.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	328.100.000	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	328.100.000	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	328.100.000	-	-

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 sebesar 0,00% dibandingkan Realisasi TA 2024. Belanja Gedung dan Bangunan ini berasal dari Tidak Ada Pagu Belanja Modal Gedung Bangunan untuk tahun 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.3.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal, Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan Tidak Ada Pagu Belanja Modal untuk tahun 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.3.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya per tanggal per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, sebesar 0,00 % dibandingkan Realisasi TA 2024. Hal ini disebabkan Tidak Ada Pagu Belanja Modal Lainnya untuk tahun 2025.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya dan/atau Aset Lainnya dari Hibah	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.4 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi tersebut pada TA 2025 sebesar 0,00 % dibandingkan TA 2024. Belanja Bantuan Sosial .

Perbandingan Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI T.A. 2025	REALISASI T.A. 2024	%
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial Dalam Bentuk Uang - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja	-	-	-
Jumlah Belanja	-	-	-

B.2.5 Rincian Output Per Fungsi

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi Program Dukungan Manajemen Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dan Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat banding dan Tingkat Pertama yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2025 untuk periode 31 Desember 2025 pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, antara lain sebagai berikut:

Kementerian /Lembaga : (005) Mahkamah Agung
 Unit Organisasi : (01) Badan Urusan Administrasi
 Satuan Kerja : (401112) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
 Program : (005.01.WA) Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat banding dan Tingkat Pertama
 Lokasi : (0100) Jakarta

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Ket
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1071	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	328.250.000	328.100.000	99.95	15	15	Unit	100	-
6986	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	25.085.299.000	24.804.681.984	98.88	1	1	Layanan	100	0
SUBTOTAL		25.413.549.000	25.132.781.984	98.90	1	1	Layanan	100	0

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Uang Tunai	-	-
Kwitansi belum di Pertanggung Jawabkan	-	-
Kas di Bank	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Pengeluaran :

Sisa Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2025 sudah disetorkan ke kas negara sebesar Rp. 6.124.012,- dengan kode 815111 dengan Nomor NTPN 91D612CPTMCKM13C Tanggal 29 Desember 2025

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Rincian Kas di Kas di Bendahara Penerimaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
-	-	-
Jumlah	-	-

Penjelasan tentang Kas Di Bendahara Penerimaan :

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP sementara setara kas adalah investasi investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Kas Lainnya dan Setara Kas Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Uang di bank	-	-
-	-	-
Jumlah	-	-

C.4 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp531.873 dan Rp399.967. Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) merupakan hak yang masih diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) disajikan sebagai berikut

Rincian Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
Beban Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	531.873,00	399.967,00
	-	-
	-	-
Jumlah	531.873	399.967

Penjelasan tentang Belanja Dibayar Dimuka :

Belanja Langanan Canva Pro selama 1 Tahun dari 18 Mei 2025 s/d 17 Mei 2026 , Google Drive (Keuangan) selama 1 Tahun dari 13 Februari 2025 s/d 12 Februari 2026, Google Drive (ptadkijakarta) selama 1 Tahun dari 15 Maret 2025 s/d 14 Maret 2026 dan Google Drive (dokumen.kepeg) 26 Nopember 2025 s/d 25 Nopember 2026

C.5 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan penerimaan di masa yang akan datang (dalam waktu 1 tahun) yang telah diakui dan dicatat sebagai pendapatan pemerintah pada periode berjalan, karena manfaat atas aset, barang, dan/atau jasa pemerintah telah diterima oleh pihak lainnya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Keterangan	TAHUN 2025	TAHUN 2024
	-	-
Jumlah	-	-

C.6 Piutang Bukan Pajak

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp264.906. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang Bukan Pajak pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis Piutang	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Piutang Lainnya	-	-
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	-	264.906
Jumlah	-	264.906

C.7 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp1.324. Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jangka Pendek	% penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	264.906	0.5%	1.325
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	-	100%	-
Jumlah	264.906		1.325

C.8 Persediaan

Nilai Persediaan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing adalah sebesar Rp26.741.590 dan Rp3.959.240. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

Jenis	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024
Barang Konsumsi	26.046.090	3.755.240
Bahan untuk Pemeliharaan	695.500	204.000
Jumlah	26.741.590	3.959.240

Persediaan tersebut di atas dalam Kondisi persediaan dalam keadaan baik

C.9 Tanah

Nilai aset tetap berupa Tanah yang dimiliki per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp20.367.671.000 dan Rp20.367.671.000. Nilai Tanah tersebut . Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	20.367.671.000
Mutasi tambah :	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
Mutasi kurang :	
Transfer Keluar	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	20.367.671.000

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Tanah Tahunan (Unaudited) TA 2025

No.	Luas	Lokasi	Nilai
1	732 M2	Jalan H. Sinen Pasar Minggu, Ragunan, Jakarta Selatan	15.215.744.000
2	592 M2	Jalan Swakarsa V Pondok Kelapa Duren Sawit Jakarta Timur	5.151.927.000
3	-	-	-
4	-	-	-
Jumlah			20.367.671.000

Penjelasan tentang kondisi Tanah

C.10 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp5.146.485.979 dan Rp4.732.397.557. Nilai Peralatan dan Mesin dan mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	4.732.397.557
Mutasi tambah:	
Pembelian	328.100.000
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	5.146.485.979
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(4.608.822.940)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	537.663.039

Mutasi transaksi penambahan peralatan mesin berupa:

- Penambahan dari Transfer masuk berupa 1 Buah Scanner Rp. 12.950.000,-; 3 Buah CCTV Rp. 4.065.600,- ; Televisi Rp. 33.740.000,- ; Digital Recording System 1 Buah Rp. 6.283.200,- ; P.C Unit 1 Buah Rp. 9.319.622,- ; Note Book 1 Buah Rp. 19.630.000,-
- Penambahan dari pembelian berupa Pembeli AC Split sebanyak 15 Unit Rp. 178.250.000,-
- Penambahan Anggaran Belanja Tambahan Pada Bulan Desember 2025 untuk pengadaan Sound System sebanyak 1 Paket Rp. 54.945.000, Camera Conference sebanyak 1 Unit Rp. 69.930.000,- dan P.C Unit sebanyak 1 Unit Rp. 24.975.000,-

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.11 Gedung dan Bangunan

Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.514.357.416 dan Rp3.514.357.416. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	3.514.357.416
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	-
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per 31 Desember 2025	3.514.357.416
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(742.641.992)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	2.771.715.424

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan berupa:

- Tidak ada mutasi Tambah

Mutasi transaksi pengurangan Gedung dan Bangunan berupa:

- Tidak ada Mutasi Kurang

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.12 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.49.563.000 dan Rp.49.563.000. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	49.563.000
Mutasi tambah:	
	-
Mutasi Kurang:	
	-
Saldo per	49.563.000
Akumulasi Penyusutan s.d.	(19.825.200)
Nilai Buku per	29.737.800

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.13 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp.236.830.863 dan Rp.236.830.863. Aset tetap tersebut . Mutasi transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Saldo Nilai Perolehan per 1 Januari 2025	236.830.863
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk	-
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	236.830.863
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	236.830.863

Rincian Aset Tetap Lainnya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan
Aset Tetap
Rp5.371.290.132

C.14 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing Rp5.371.290.132 dan Rp5.022.620.329. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahunan (Unaudited) Tahun 2025

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	5.146.485.979	(4.608.822.940)	537.663.039
2	Gedung dan Bangunan	3.514.357.416	(742.641.992)	2.771.715.424
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	49.563.000	(19.825.200)	29.737.800
4	Aset Tetap Lainnya	236.830.863	-	236.830.863
Akumulasi Penyusutan		8.947.237.258	(5.371.290.132)	3.575.947.126

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan keuangan ini.

Aset Tak Berwujud
Rp34.075.000

C.15 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp34.075.000 dan Rp34.075.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berupa Software.

Mutasi Aset Tak Berwujud adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai per 1 Januari 2025	34.075.000
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	-
	-
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	-
	-
Saldo Nilai per 31 Desember 2025	34.075.000
Akumulasi Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	(34.075.000)
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Mutasi transaksi penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud sebagai berikut :

- a. -
- b. -

C.16 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 1 Januari 2025	-
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	-
	-
Mutasi Kurang:	
Pencatatan Barang yang mau dihapuskan	-
	-
Saldo per 31 Desember 2025	-
Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2025	-
Nilai Buku per 31 Desember 2025	-

Transaksi penambahan dan pengurangan Aset Lain-lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

Mutasi Tambah

-

Mutasi Kurang

-

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada lampiran Laporan Keuangan ini.

Saldo Aset Lainnya yang Belum Diregister per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp0 dan Rp0.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya 34.075.000

C.17 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah Rp34.075.000 dan Rp34.075.000. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Sedangkan Amortisasi Aset Lainnya merupakan akumulasi amortisasi tak berwujud yang mencakup penurunan kapasitas atau masa manfaat yang diakui pemerintah dari sejak diperoleh atau dibeli oleh satker. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Lainnya	Nilai Perolehan	Akum. Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud			
Aset Tak Berwujud	34.075.000	(34.075.000)	-
Aset Lain-lain	-	-	-
	-	-	-
Total	34.075.000	(34.075.000)	-

C.18 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp3.090.348.225 dan Rp57.602.831. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
Beban Pegawai yang Masih Harus Dibayar	3.067.111.588	54.973.000
Beban Barang yang Masih Harus Dibayar	23.236.637	2.629.831
	-	-
Total	3.090.348.225	57.602.831

Penjelasan tentang Utang kepada Pihak Ketiga :

Untuk Daftar Rincian detail terlampir

C.19 Utang Yang Belum Ditagihkan

Nilai Utang Yang Belum Ditagihkan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Adapun rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut :

Rincian Utang Yang Belum Ditagihkan

Uraian	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A.2024
Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	-	-
Total	-	-

Penjelasan tentang Utang Yang Belum Ditagihkan :

C.20 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp20.880.543.364. dan Rp23.825.219.465. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS OPERASIONAL

Pendapatan Perpajakan
Rp0

D.1 Pendapatan Perpajakan

Jumlah Pendapatan Perpajakan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Realisasi pendapatan perpajakan dari tahun sebelumnya sebesar 0,00. Hal tersebut disebabkan oleh . Rincian Pendapatan perpajakan tersebut adalah sebagai berikut :"

Pendapatan Negara
Bukan Pajak
Rp18.079.392

D.2 Pendapatan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp18.079.392 dan Rp18.840.335. Realisasi pendapatan negara bukan pajak mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 4,04. Hal tersebut disebabkan oleh PNPB berasal dari sewa rumah dinas Ketua, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dan Ketua beserta Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak tersebut adalah sebagai berikut :"

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	2025	2024	%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	18.840.335,00	(100,00)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	18.079.392	-	-
	-	-	-
Jumlah	18.079.392,00	18.840.335,00	(4,04)

Beban Pegawai
Rp24.088.794.030

D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp24.088.794.030 dan Rp16.901.902.750.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.. Beban Pegawai Tahun 2025 sebesar 42,52 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Karena ada mutasi pegawai dan hakim tinggi ke satuan kerja lain. Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pegawai Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Gaji Pokok PNS	5.703.501.360	5.431.162.480	5,01
Beban Pembulatan Gaji PNS	62.218	59.685	4,24
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	398.300.250	390.297.650	2,05
Beban Tunj. Anak PNS	83.493.508	75.523.366	10,55
Beban Tunj. Struktural PNS	80.100.000	93.870.000	(14,67)
Beban Tunj. Fungsional PNS	391.600.000	8.240.580.000	(95,25)
Beban Tunj. PPh PNS	67.259.165	1.637.485.583	(95,89)
	-	-	-
Jumlah	24.088.794.030	16.901.902.750	42,52

D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp106.987.900 dan Rp110.184.910

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi barang-barang yang habis dipakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban Persediaan Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 2,90 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Penurunan beban persediaan disebabkan karena bertambahnya pagu anggaran belanja persediaan konsumsi. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Persediaan konsumsi	106.987.900	110.184.910	(2,90)
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah Beban Persediaan	106.987.900,00	110.184.910	(2,90)

D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.590.609.069 dan Rp2.857.181.786.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Beban Barang dan Jasa Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 9,33 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Karena berkurangnya pagu anggaran belanja barang. Rincian Beban Barang dan Jasa Untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Keperluan Perkantoran	1.328.673.150	1.584.249.046	(16,13)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1.799.600	1.580.520	13,86
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	81.360.000	65.472.000	24,27
Beban Barang Operasional Lainnya	-	45.707.650	(100,00)
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
Beban Langganan Telepon	21.520.641	21.601.860	(0,38)
Beban Langganan Air	20.550.120	16.012.535	28,34
Beban Sewa	1.115.612.900	1.116.707.175	(0,10)
Beban Jasa Profesi	-	3.600.000	(100,00)
Jumlah	2.590.609.069	2.857.181.786,00	(9,33)

D.6 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp968.889.016 dan Rp957.900.545.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Beban Pemeliharaan Tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar 1,15 persen dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh Kenaikan beban pemeliharaan disebabkan adanya beban terkait tambahan anggaran pemeliharaan Gedung dan Bangunan Rincian Beban Pemeliharaan untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Pemeliharaan Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	430.532.200	408.490.855	5,40
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	115.046.585	120.999.150	(4,92)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	419.320.731	423.603.240	(1,01)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	3.989.500	4.807.300	(17,01)
Jumlah	968.889.016	957.900.545	1,15

D.7 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp59.043.000 dan Rp124.621.590

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 52,62 persen disebabkan oleh . Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2025 dan 2024 :

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2019	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Perjalanan Biasa	9.893.000	62.139.590	(84,08)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	49.150.000	62.482.000	(21,34)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-
Jumlah	59.043.000,00	124.621.590	(52,62)

D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang dan jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas. Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 sebesar 0,00 dibandingkan dengan Tahun 2024 disebabkan oleh. Rincian Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Beban Bantuan Sosial
Rp0

D.9 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun 2025 sebesar 0,00 disebabkan oleh . Rincian Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Bantuan Sosial Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk barang - Penanganan Pandemi COVID-19	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp339.350.181

D.10 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp339.350.181 dan Rp289.577.727.

Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	250.371.920	200.599.466	24,81
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	87.739.186	87.739.186	-
Beban Penyusutan Jaringan	1.239.075	1.239.075	-
Jumah Penyusutan	339.350.181	289.577.727	17,19
	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	339.350.181	289.577.727	17,19

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Rp-1.324

D.11 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp-1.324 dan Rp1.324

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Beban Penyisihan Piutang PNPB	(1.324)	1.324	(200)
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	-
Jumlah	(1.324,00)	1.324	(200)

Surplus (Defisit)
Penjualan Aset Non
Lancar Rp0

D.12 Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar

Jumlah Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp45.437.500

Rincian Surplus (Defisit) Penjualan Aset Non Lancar Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	-	-	-
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	47.462.500,00	(100)
Jumlah	-	45.437.500	(100)

Surplus (Defisit)
Penyelesaian
Kewajiban Jangka
Panjang Rp0

D.13 Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang

Jumlah Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Rincian Surplus (Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus (Defisit) dari
Kegiatan Non
Operasional Lainnya Rp0

D.14 Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Rincian Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahunan (Unaudited) TA 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-
Pendapatan Selisih Kurs yang Belum Terealisasi	-	-	-
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Pos Luar Biasa Rp0

D.15 Pos Luar Biasa

Jumlah Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut :

Rincian Pos Luar Biasa Tahunan (Unaudited) 2025 dan 2024

URAIAN JENIS BEBAN	REALISASI T.A.2025	REALISASI T.A. 2024	%
Pendapatan PNPB	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-
Beban Persediaan	-	-	-
	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Ekuitas Awal
Rp23.825.219.465,00

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Nilai Ekuitas Awal pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.23.825.219.465,00 dan Rp.24.085.193.691,00

Defisit LO
Rp.28.135.592.480,00

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.28.135.592.480,00 dan Rp.21.177.092.797,00. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Rp.0.00

E.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0.

E.4 KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS

Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yaitu sebagai berikut .

Penyesuaian Nilai Aset
Rp.0,00

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan
Rp0,00

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi untuk 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Atas Reklasifikasi
Rp0,00

E.4.3 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Atas Reklasifikasi merupakan koreksi atasatas reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	-
	-
Jumlah	-

Selisih Revaluasi Aset
Rp.0,00

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp.0,00. Revaluasi tersebut berasal dari

Selisih Revaluasi Nilai Aset Tetap mencerminkan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan Rincian untuk tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Rincian Selisih Revaluasi Aset Tahun 2025

Jenis Aset	Nilai Koreksi
Ekuitas Transaksi Lainnya	-
Revaluasi Aset Tetap	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi Rp0

E.4.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. .

Koreksi ini

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi per 31 Desember 2025

Jenis Aset Tetap Non Revaluasi	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Persediaan	-
	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-Lain Rp0

E.4.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.. Koreksi ini adalah . Koreksi Lain-Lain terdiri dari :

Rincian Koreksi Lain-Lain Tahun 2025

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi
Koreksi Lainnya	-
	-
Jumlah	-

Transaksi Antar Entitas Rp25.190.916.379

E.5 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.25.190.916.379 dan Rp.20.917.118.571. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal Kementerian /Lembaga (KL), antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. terdiri dari :

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember2025

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	25.132.591.877
Diterima dari Entitas Lain	(18.344.298)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	76.668.800
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
	-
Jumlah	25.190.916.379

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2025, DKEL sebesar Rp 25.132.591.877, sedangkan DDEL sebesar minus Rp 18.344.298

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dengan BA-BUN.

Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp0 terdiri dari :

Rincian Transfer Keluar Tahun 2025

Jenis	Entitas Tujuan	Nilai
-	-	-
-	-	-
Jumlah		-

Sedangkan Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp76.668.800 yang terdiri dari :

Jenis	Entitas Asal	Nilai
Peralatan dan Mesin	Badan Urusan Administrasi MARI	76.668.800
-	-	-
Jumlah		-

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 0 dari total Rp0 yang akan diterima sepanjang tahun 2025

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar 0 dari total Rp0.

Rincian Pengesahan Hibah Langsung untuk Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai
-	-	-
Total Pengesahan		-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-	-
Jumlah		-

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2025 disajikan pada lampiran

*Ekuitas Akhir
Rp20.880.543.364*

E.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp.20.880.543.364,00 dan Rp.23.825.219.465,00.

E.7 Catatan Penting Lainnya Laporan Perubahan Ekuitas

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca pada satuan kerja Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang mempengaruhi penyajian posisi Laporan Keuangan per 31 Desember 2025.

F.2 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Tidak ada Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK setelah tanggal Neraca periode 31 Desember 2025

F.3 DAFTAR REKENING PEMERINTAH

Daftar Rekening Pemerintah yang dikelola oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yaitu :

- a. BRI Unit Pulogadung Jakarta a/c 653244011121000 a.n. BPG175.PTA JAKARTA (401112) digunakan sebagai Penampung Uang APBN untuk DIPA BUA dengan saldo per 31 Desember 2025 sebesar Rp.0,-

F.4 RALAT SPM, SSBP, SSPB

F.5 CATATAN PENTING LAINNYA

Tim Pengelola Anggaran:

Kuasa Pengguna Anggaran : Wahida Muslihah

Pejabat Pembuat Komitmen : Rizal Mutaqin

Pejabat Penandatanganan SPM : Dewi Utari

Bendara Pengeluaran : Rizcky Fallah Romadhon N

Bendahara Penerimaan : Nur Alisa

Operator GLP : Restiana Irwanti

Operator Aset : Awanda Septian

LAMPIRAN A.1

PENYUSUTAN ASET TETAP

LAMPIRAN A.1

TABEL PENYUSUTAN TAHUNAN TAHUN 2025

KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
				SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
131111	Tanah	1.309	20.367.671.000	0	0	0	20.367.671.000
2010101001	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	1.309	20.367.671.000	0	0	0	20.367.671.000
132111	Peralatan dan Mesin	424	5.146.485.979	(4.349.131.398)	(259.691.542)	(4.608.822.940)	537.663.039
3010305003	Stationary Water Pump	1	45.909.000	(45.909.000)	0	(45.909.000)	0
3020101001	Sedan	4	1.028.261.212	(1.028.261.212)	0	(1.028.261.212)	0
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	4	627.694.300	(627.694.300)	0	(627.694.300)	0
3020104001	Sepeda Motor	4	59.356.000	(59.356.000)	0	(59.356.000)	0
3050104001	Lemari Besi/Metal	4	56.548.487	(23.107.796)	(11.146.897)	(34.254.693)	22.293.794
3050104002	Lemari Kayu	35	95.643.000	(95.643.000)	0	(95.643.000)	0
3050104007	Brandkas	3	9.213.000	(9.213.000)	0	(9.213.000)	0
3050104013	Buffet	4	7.043.000	(7.043.000)	0	(7.043.000)	0
3050104014	Mobile File	2	130.310.142	(130.310.142)	0	(130.310.142)	0
3050104016	Roll Opek	2	7.250.000	(7.250.000)	0	(7.250.000)	0
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	17	25.863.200	(21.797.600)	(406.560)	(22.204.160)	3.659.040
3050105017	Mesin Absensi	1	9.950.000	(8.955.000)	(995.000)	(9.950.000)	0
3050105048	LCD Projector/Infocus	2	59.000.000	(39.300.000)	(11.800.000)	(51.100.000)	7.900.000
3050105999	Perkakas Kantor Lainnya	1	11.275.000	(11.275.000)	0	(11.275.000)	0
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	3	828.000	(828.000)	0	(828.000)	0
3050201002	Meja Kerja Kayu	14	52.972.000	(52.972.000)	0	(52.972.000)	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	38	333.131.060	(208.006.060)	(35.750.000)	(243.756.060)	89.375.000
3050201005	Sice	14	150.265.015	(150.265.015)	0	(150.265.015)	0
3050201011	Tempat Tidur Kayu	13	39.432.500	(39.432.500)	0	(39.432.500)	0
3050201016	Kasur/Spring Bed	1	166.000	(166.000)	0	(166.000)	0
3050201019	Meja Makan Kayu	3	11.667.000	(11.667.000)	0	(11.667.000)	0
3050201999	Meubelair Lainnya	12	22.677.000	(22.677.000)	0	(22.677.000)	0
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2	12.244.000	(12.244.000)	0	(12.244.000)	0
3050204001	Lemari Es	2	3.570.000	(3.570.000)	0	(3.570.000)	0
3050204004	A.C. Split	39	339.326.111	(131.226.743)	(47.541.568)	(178.768.311)	160.557.800
3050204005	Portable Air Conditioner (Alat Pendingin)	2	49.940.000	(49.940.000)	0	(49.940.000)	0
3050204007	Exhause Fan	2	3.996.000	(1.598.400)	(799.200)	(2.397.600)	1.598.400
3050205008	Kitchen Set	3	33.117.000	(33.117.000)	0	(33.117.000)	0

3050206002	Televisi	8	87.715.000	(53.975.000)	(3.374.000)	(57.349.000)	30.366.000
3050206006	Equalizer	1	2.189.500	(2.189.500)	0	(2.189.500)	0
3050206008	Sound System	1	54.945.000	0	(5.494.500)	(5.494.500)	49.450.500
3050206016	Mic Conference	15	56.372.800	(56.372.800)	0	(56.372.800)	0
3050206037	Mimbar/Podium	1	4.410.000	(3.969.000)	(441.000)	(4.410.000)	0
3050206042	Lambang Instansi	1	4.475.828	(4.475.828)	0	(4.475.828)	0
3050299999	Alat Rumah Tangga Lainnya	1	1.500.000	(1.350.000)	(150.000)	(1.500.000)	0
3060101002	Audio Mixing Portable	1	32.500.000	(32.500.000)	0	(32.500.000)	0
3060101040	Power Supply Microphone	1	20.815.400	(20.815.400)	0	(20.815.400)	0
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	5	35.306.000	(35.306.000)	0	(35.306.000)	0
3060101060	Power Amplifier	1	7.937.000	(7.937.000)	0	(7.937.000)	0
3060101065	Chairman/Audio Conference	1	9.877.440	(9.877.440)	0	(9.877.440)	0
3060102165	Camera Conference	1	69.930.000	0	(6.993.000)	(6.993.000)	62.937.000
3060201001	Telephone (PABX)	1	13.497.000	(13.497.000)	0	(13.497.000)	0
3060201003	Pesawat Telephone	3	1.980.000	(1.980.000)	0	(1.980.000)	0
3060201006	Handy Talky (HT)	4	9.800.000	(8.820.000)	(980.000)	(9.800.000)	0
3060206002	Wireless Amplifier	1	7.710.000	(7.710.000)	0	(7.710.000)	0
3060209007	Digital Recording System	1	6.283.200	0	(628.320)	(628.320)	5.654.880
3100101003	Local Area Network (LAN)	6	29.361.600	(29.361.600)	0	(29.361.600)	0
3100101004	Internet	1	5.000.000	(5.000.000)	0	(5.000.000)	0
3100102001	P.C Unit	59	649.496.790	(580.514.668)	(47.128.997)	(627.643.665)	21.853.125
3100102002	Lap Top	31	414.110.000	(374.761.250)	(26.232.500)	(400.993.750)	13.116.250
3100102003	Note Book	2	29.330.000	(9.700.000)	(2.453.750)	(12.153.750)	17.176.250
3100102999	Personal Komputer Lainnya	1	29.800.000	(29.800.000)	0	(29.800.000)	0
3100201012	Hard Disk	2	4.431.194	(4.431.194)	0	(4.431.194)	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	25	80.818.000	(66.818.000)	(10.150.000)	(76.968.000)	3.850.000
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	10	121.482.000	(58.143.250)	(26.051.250)	(84.194.500)	37.287.500
3100203010	CD Writer	1	700.500	(700.500)	0	(700.500)	0
3100204001	Server	2	119.106.700	(87.344.200)	(21.175.000)	(108.519.200)	10.587.500
3100204002	Router	1	7.260.000	(7.260.000)	0	(7.260.000)	0
3100204003	Hub	3	1.697.000	(1.697.000)	0	(1.697.000)	0
133111	Gedung dan Bangunan	9	3.514.357.416	(654.902.806)	(87.739.186)	(742.641.992)	2.771.715.424
4010125005	Kanopi	1	28.555.416	(1.142.216)	(571.108)	(1.713.324)	26.842.092
4010201001	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	1	759.313.000	(135.591.606)	(18.078.881)	(153.670.487)	605.642.513
4010201004	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	6	2.203.210.000	(424.726.304)	(56.630.173)	(481.356.477)	1.721.853.523
4010201007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	1	523.279.000	(93.442.680)	(12.459.024)	(105.901.704)	417.377.296
134113	Jaringan	1	49.563.000	(18.586.125)	(1.239.075)	(19.825.200)	29.737.800
5040202001	Jaringan Distribusi Tegangan Diatas 20 KVA	1	49.563.000	(18.586.125)	(1.239.075)	(19.825.200)	29.737.800
135111	Aset Tetap Renovasi	1	217.008.008	0	0	0	217.008.008

6070301001	Gedung dan Bangunan Dalam Renovasi	1	217.008.008	0	0	0	217.008.008
135121	Aset Tetap Lainnya	233	19.822.855	0	0	0	19.822.855
6010101001	Monografi	199	15.887.429	0	0	0	15.887.429
6010101999	Buku Lainnya	32	3.585.426	0	0	0	3.585.426
6010303001	Lukisan Kanvas	2	350.000	0	0	0	350.000
JUMLAH		1.977	29.314.908.258	(5.022.620.329)	(348.669.803)	(5.371.290.132)	23.943.618.126

LAMPIRAN A.2
TABEL KONSTRUKSI DALAM
PENGERJAAN

LAMPIRAN A.2
TABEL RINCIAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
TAHUNAN TAHUN 2025

SUB-SUB KELOMPOK BARANG		JUMLAH S.D 1 JANUARI 2025	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO PER 31 DESEMBER 2025
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI
NIHIL					
TOTAL					

LAMPIRAN A.3

HIBAH

LAMPIRAN A.3
HIBAH
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
TAHUNAN TAHUN 2025

No	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
1	NIHIL						
2							
3							

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA 401112

Tgl Data : 25/02/26 7:53 AM
Tgl Cetak : 25/02/26 11:19 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_satker_new_poc

URAIAN	2025				2024			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Insentif Fiskal	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	25,413,549,000	25,132,591,877	(280,957,123)	98.89	21,226,257,000	20,955,676,500	(270,580,500)	98.73
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

JAKARTA, 25 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

WAHIDA MUSLIHAH
NIP. 197803272002122001



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 01 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : 0100 DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : 401112 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 25/02/26 11:20 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	14,938,000	0	0	0	0
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	18,344,298	0	18,344,298	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	14,938,000	18,344,298	0	18,344,298	122.8
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	14,938,000	18,344,298	0	18,344,298	122.8
	JUMLAH PENDAPATAN	14,938,000	18,344,298	0	18,344,298	122.8

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 01 **BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI : 0100 **DKI JAKARTA**
SATUAN KERJA : 401112 **PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
 Tanggal : 25/02/26 11:20 AM
 Halaman : 1
 Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
 Tgl Data : 25/2/26 8:31 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	5,213,833,000	5,707,176,000	5,706,687,960	3,186,600	5,703,501,360	99.94	3,674,640
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	73,000	73,000	62,392	174	62,218	85.23	10,782
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	396,108,000	400,192,000	398,618,910	318,660	398,300,250	99.53	1,891,750
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	74,647,000	83,903,000	83,557,240	63,732	83,493,508	99.51	409,492
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	93,870,000	80,680,000	80,100,000	0	80,100,000	99.28	580,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	11,592,960,000	392,540,000	392,540,000	940,000	391,600,000	99.76	940,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	2,758,092,000	68,395,000	67,259,165	0	67,259,165	98.34	1,135,835
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	183,013,000	215,000,000	213,204,480	217,260	212,987,220	99.06	2,012,780
511129	Belanja Uang Makan PNS	727,848,000	728,848,000	699,679,000	0	699,679,000	96	29,169,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	35,990,000	34,770,000	33,945,000	190,000	33,755,000	97.08	1,015,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	21,076,434,000	7,711,577,000	7,675,654,147	4,916,426	7,670,737,721	99.47	40,839,279
5113	Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara							
511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	0	2,593,122,000	2,467,571,513	0	2,467,571,513	95.16	125,550,487
511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	0	10,687,100,000	10,685,400,000	93,600,000	10,591,800,000	99.11	95,300,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5113	0	13,280,222,000	13,152,971,513	93,600,000	13,059,371,513	98.34	220,850,487
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	92,693,000	242,840,000	242,324,000	0	242,324,000	99.79	516,000
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9,000	8,000	4,772	0	4,772	59.65	3,228
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	4,954,000	13,128,000	12,150,480	0	12,150,480	92.55	977,520
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	1,480,000	4,130,000	3,914,076	0	3,914,076	94.77	215,924
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	15,002,000	14,462,000	14,462,000	0	14,462,000	100	0
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4,954,000	15,600,000	15,497,880	0	15,497,880	99.35	102,120
511628	Belanja Uang Makan PPPK	19,400,000	54,400,000	47,393,000	0	47,393,000	87.12	7,007,000
511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	10,800,000	10,800,000	0	10,800,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	138,492,000	355,368,000	346,546,208	0	346,546,208	97.52	8,821,792
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	21,214,926,000	21,347,167,000	21,175,171,868	98,516,426	21,076,655,442	98.73	270,511,558
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,625,010,000	1,332,126,000	1,328,884,606	0	1,328,884,606	99.76	3,241,394
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,800,000	1,800,000	1,799,600	0	1,799,600	99.98	400
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	81,360,000	81,360,000	81,360,000	0	81,360,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	1,708,170,000	1,415,286,000	1,412,044,206	0	1,412,044,206	99.77	3,241,794

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

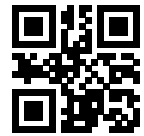


KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 **MAHKAMAH AGUNG**
ESELON I : 01 **BADAN URUSAN ADMINISTRASI**
WILAYAH/PROVINSI : 0100 **DKI JAKARTA**
SATUAN KERJA : 401112 **PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 25/02/26 11:20 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_satker_poc
Tgl Data : 25/2/26 8:31 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	300,000	300,000	300,000	0	300,000	100	0
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	700,000	700,000	668,100	0	668,100	95.44	31,900
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	1,000,000	1,000,000	968,100	0	968,100	96.81	31,900
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	104,368,000	133,760,000	133,759,750	0	133,759,750	100	250
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	104,368,000	133,760,000	133,759,750	0	133,759,750	100	250
5221	Belanja Jasa							
522112	Belanja Langganan Telepon	36,000,000	24,000,000	21,525,358	0	21,525,358	89.69	2,474,642
522113	Belanja Langganan Air	42,000,000	21,120,000	20,063,155	0	20,063,155	95	1,056,845
522141	Belanja Sewa	1,333,252,000	1,118,392,000	1,115,533,350	0	1,115,533,350	99.74	2,858,650
522191	Belanja Jasa Lainnya	2,400,000	6,000	0	0	0	0	6,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	1,413,652,000	1,163,518,000	1,157,121,863	0	1,157,121,863	99.45	6,396,137
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	328,495,000	430,546,000	430,532,200	0	430,532,200	100	13,800
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	110,000,000	115,060,000	115,046,585	0	115,046,585	99.99	13,415
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	426,902,000	419,337,000	419,320,731	0	419,320,731	100	16,269
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	865,397,000	964,943,000	964,899,516	0	964,899,516	100	43,484
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	72,000,000	10,475,000	9,893,000	0	9,893,000	94.44	582,000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	47,250,000	49,150,000	49,150,000	0	49,150,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	119,250,000	59,625,000	59,043,000	0	59,043,000	99.02	582,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	4,211,837,000	3,738,132,000	3,727,836,435	0	3,727,836,435	99.72	10,295,565
53	BELANJA MODAL							
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin							
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	178,250,000	328,250,000	328,100,000	0	328,100,000	99.95	150,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5321	178,250,000	328,250,000	328,100,000	0	328,100,000	99.95	150,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	178,250,000	328,250,000	328,100,000	0	328,100,000	99.95	150,000
	JUMLAH BELANJA	25,605,013,000	25,413,549,000	25,231,108,303	98,516,426	25,132,591,877	98.89	280,957,123

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (401112) PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl Data : 25/02/26 7:53 AM
Tgl Cetak : 25/02/26 11:19 AM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	531,873	399,967	131,906	32.98
Piutang Bukan Pajak	0	264,906	(264,906)	(100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	(1,324)	1,324	(100.00)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	0	263,582	(263,582)	(100.00)
Persediaan	26,741,590	3,959,240	22,782,350	575.42
JUMLAH ASET LANCAR	27,273,463	4,622,789	22,650,674	489.98
ASET TETAP				
Tanah	20,367,671,000	20,367,671,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	5,146,485,979	4,732,397,557	414,088,422	8.75
Gedung dan Bangunan	3,514,357,416	3,514,357,416	0	0.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	49,563,000	49,563,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	236,830,863	236,830,863	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(5,371,290,132)	(5,022,620,329)	(348,669,803)	6.94
JUMLAH ASET TETAP	23,943,618,126	23,878,199,507	65,418,619	0.27
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	34,075,000	34,075,000	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(34,075,000)	(34,075,000)	0	0.00
JUMLAH ASET LAINNYA	0	0	0	
JUMLAH ASET	23,970,891,589	23,882,822,296	88,069,293	0.37
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	3,090,348,225	57,602,831	3,032,745,394	5,264.92
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3,090,348,225	57,602,831	3,032,745,394	5,264.92
JUMLAH KEWAJIBAN	3,090,348,225	57,602,831	3,032,745,394	5,264.92
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	20,880,543,364	23,825,219,465	(2,944,676,101)	(12.36)
JUMLAH EKUITAS	20,880,543,364	23,825,219,465	(2,944,676,101)	(12.36)
JUMLAH EKUITAS	20,880,543,364	23,825,219,465	(2,944,676,101)	(12.36)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	23,970,891,589	23,882,822,296	88,069,293	0.37

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (401112) PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl Data : 25/02/26 7:53 AM
Tgl Cetak : 25/02/26 11:19 AM
Halaman : 2

lap_neraca_satker_komparatif_poc

Keterangan :

FINAL

JAKARTA, 25 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN



WAHIDA MUSLIHAH
NIP. 197803272002122001



NERACA PERCOBAAN
TINGKAT SATUAN KERJA
 PER 1 JANUARI 2025 (SALDO AWAL)
 (DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005
 UNIT ORGANISASI : 01
 WILAYAH/PROVINSI : 0100
 SATUAN KERJA : 401112

MAHKAMAH AGUNG
 BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 DKI JAKARTA
 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl. Cetak 25/02/2026 11:22 AM
 lap_neraca_percobaan_sawal_akrua_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	399,967	0
0.0	115211	Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	264,906	0
0.0	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	0	1,324
0.0	117111	Barang Konsumsi	3,755,240	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	204,000	0
0.0	131111	Tanah	20,367,671,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	4,732,397,557	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	3,514,357,416	0
0.0	134113	Jaringan	49,563,000	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	217,008,008	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	19,822,855	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	4,349,131,398
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	654,902,806
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	18,586,125
0.0	162151	Software	34,075,000	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	34,075,000
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	54,973,000
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	2,629,831
0.0	391111	Ekuitas	0	23,825,219,465
JUMLAH			28,939,518,949	28,939,518,949

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (401112) PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl Data : 25/02/26 7:53 AM

Tgl Cetak : 25/02/26 11:20 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	114112	Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	531,873	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	26,046,090	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	695,500	0
0.0	131111	Tanah	20,367,671,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	5,146,485,979	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	3,514,357,416	0
0.0	134113	Jaringan	49,563,000	0
0.0	135111	Aset Tetap Renovasi	217,008,008	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	19,822,855	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	4,608,822,940
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	742,641,992
0.0	137313	Akumulasi Penyusutan Jaringan	0	19,825,200
0.0	162151	Software	34,075,000	0
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	34,075,000
0.0	212111	Belanja pegawai yang masih harus dibayar	0	3,067,111,588
0.0	212112	Belanja barang yang masih harus dibayar	0	23,236,637
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	25,132,591,877
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	18,344,298	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	76,668,800
0.0	391111	Ekuitas	0	23,825,219,465
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	18,079,392
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	5,703,501,360	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	62,218	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	398,300,250	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	83,493,508	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	80,100,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	391,600,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	67,259,165	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	212,987,220	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	702,300,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	33,755,000	0
3.0	511324	Beban Tunj. PPh Pejabat Negara	3,162,789,101	0
3.0	511339	Beban Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	12,894,900,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	242,324,000	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	4,772	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	12,150,480	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	3,914,076	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	14,462,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (401112) PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl Data : 25/02/26 7:53 AM

Tgl Cetak : 25/02/26 11:20 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	15,497,880	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	58,593,000	0
3.0	511633	Beban Tunjangan Umum PPPK	10,800,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	1,328,673,150	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,799,600	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	81,360,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	300,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	668,100	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	20,124,558	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	21,520,641	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	20,550,120	0
3.0	522141	Beban Sewa	1,115,612,900	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	430,532,200	0
3.0	523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	115,046,585	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	419,320,731	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	9,893,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	49,150,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	250,371,920	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	87,739,186	0
3.0	591313	Beban Penyusutan Jaringan	1,239,075	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	106,987,900	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	3,989,500	0
3.0	594211	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNBPN	0	1,324
JUMLAH			57,548,274,215	57,548,274,215

Keterangan :

FINAL

JAKARTA, 25 Februari 2026
 Penanggung Jawab UAKPA
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN

WAHID MUSLIHAH
 NIP. 197803272002122001

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (401112) PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl Data : 24/02/26 6:42 PM

Tgl Cetak : 25/02/26 11:20 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	25,132,591,877
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	18,344,298	0
3.0	425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	18,344,298
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	5,706,687,960	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	62,392	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	398,618,910	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	83,557,240	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	80,100,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	392,540,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	67,259,165	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	213,204,480	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	699,679,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	33,945,000	0
3.0	511324	Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	2,467,571,513	0
3.0	511339	Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	10,685,400,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	242,324,000	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4,772	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	12,150,480	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	3,914,076	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	14,462,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	15,497,880	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	47,393,000	0
3.0	511633	Belanja Tunjangan Umum PPPK	10,800,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	1,328,884,606	0
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,799,600	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	81,360,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	300,000	0
3.0	521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	668,100	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	133,759,750	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	21,525,358	0
3.0	522113	Belanja Langganan Air	20,063,155	0
3.0	522141	Belanja Sewa	1,115,533,350	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	430,532,200	0
3.0	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	115,046,585	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	419,320,731	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	9,893,000	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	49,150,000	0
3.0	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	328,100,000	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA

SATUAN KERJA : (401112) PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl Data : 24/02/26 6:42 PM

Tgl Cetak : 25/02/26 11:20 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.1	511111	Pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS	0	3,186,600
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	174
3.1	511121	Pengembalian Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	318,660
3.1	511122	Pengembalian Belanja Tunj. Anak PNS	0	63,732
3.1	511124	Pengembalian Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	940,000
3.1	511126	Pengembalian Belanja Tunj. Beras PNS	0	217,260
3.1	511151	Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS	0	190,000
3.1	511339	Pengembalian Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	0	93,600,000
JUMLAH			25,249,452,601	25,249,452,601

Keterangan :

FINAL

JAKARTA, 25 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARANWAHIDA MUSLIHAH
197803272002122001

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (401112) PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl Data : 25/02/26 7:53 AM
Tgl Cetak : 25/02/26 11:19 AM
Halaman : 1
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan dari Kekayaan Negara dipisahkan (KND)	0	0	0	
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	18,079,392	18,840,335	(760,943)	(4.039)
Pendapatan Badan Layanan Umum	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	18,079,392	18,840,335	(760,943)	(4.039)
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	18,079,392	18,840,335	(760,943)	(4.039)
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	24,088,794,030	16,901,902,750	7,186,891,280	42.521
Beban Persediaan	106,987,900	110,184,910	(3,197,010)	(2.901)
Beban Barang dan Jasa	2,590,609,069	2,857,181,786	(266,572,717)	(9.33)
Beban Pemeliharaan	968,889,016	957,900,545	10,988,471	1.147
Beban Perjalanan Dinas	59,043,000	124,621,590	(65,578,590)	(52.622)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (401112) PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl Data : 25/02/26 7:53 AM
Tgl Cetak : 25/02/26 11:19 AM
Halaman : 2
lap_lo_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	339,350,181	289,577,727	49,772,454	17.188
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(1,324)	1,324	(2,648)	(200)
Beban Transfer ke Daerah	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	28,153,671,872	21,241,370,632	6,912,301,240	32.542
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(28,135,592,480)	(21,222,530,297)	(6,913,062,183)	32.574
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset	0	45,437,500	(45,437,500)	(100)
Pendapatan Pelepasan Aset	0	47,462,500	(47,462,500)	(100)
Beban Pelepasan Aset	0	2,025,000	(2,025,000)	(100)
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	45,437,500	(45,437,500)	(100)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(28,135,592,480)	(21,177,092,797)	(6,958,499,683)	32.859
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(28,135,592,480)	(21,177,092,797)	(6,958,499,683)	32.859

Keterangan :

FINAL



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025 - UNAUDITED
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (0100) DKI JAKARTA
SATUAN KERJA : (401112) PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

Tgl Data : 24/02/26 6:42 PM
Tgl Cetak : 25/02/26 11:19 AM
Halaman : 1
lap_lpe_satker_poc

URAIAN	2025	2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	23,825,219,465	24,085,193,691	(259,974,226)	(1.08)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(28,135,592,480)	(21,177,092,797)	(6,958,499,683)	32.86
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	25,190,916,379	20,917,118,571	4,273,797,808	20.43
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(2,944,676,101)	(259,974,226)	(2,684,701,875)	1,032.68
EKUITAS AKHIR	20,880,543,364	23,825,219,465	(2,944,676,101)	(12.36)

Keterangan :
FINAL

JAKARTA, 25 Februari 2026
Penanggung Jawab UAKPA
KUASA PENGGUNA ANGGARAN

WAHIDA MUSLIHAH
NIP.197603272002122001



KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA)
TAHUNAN (UNAUDITED) TA 2025

Kode dan Nama UAKPA : (401113) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Kode dan Nama UAPPAW : (401112) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Kode dan Nama Eselon 1 : (01) Badan Urusan Administrasi

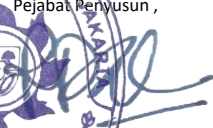
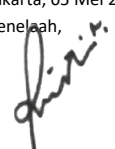
Kode dan Nama K/L : (005) Mahkamah Agung RI

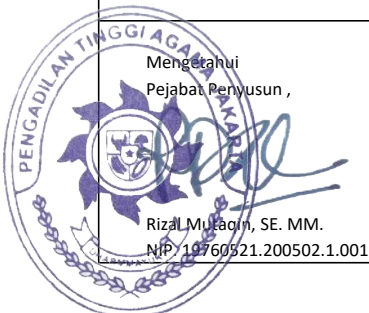
<i>Objek Penelaahan</i>		Kondisi LK		Seharusnya
<i>Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>				
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
	Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	√		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	√		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	√		Ada
	Laporan Keuangan Tambahan	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan AkruaI Saldo Awal	√		Ada
2	Neraca Percobaan AkruaI	√		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	√		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	√		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
	Kesesuaian Saldo	Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua <i>face</i> laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	√		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
	Persamaan Dasar Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/(Defisit) - LO" di LPE	√		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	√		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	√		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
	To Do List	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		√	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	√		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		√	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		√	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		√	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		√	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		√	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		√	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		√	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		√	Tidak
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i>				
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		√	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		√	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		√	Tidak
	a. Pagu/DIPA		√	Tidak
	b. Estimasi PNPB		√	Tidak
	c. Belanja		√	Tidak

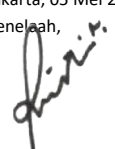
	d. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	e. Pendapatan		√	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	g. Kas BLU		√	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i. Kas Hibah		√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akrual		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)		√	Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)		√	Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)		√	Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)		√	Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (D)		√	Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)		√	Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)		√	Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak
10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		√	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		√	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		√	Tidak

4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
	Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah			
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		√	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		√	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		√	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		√	Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		√	Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)	√		Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	√		Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?	√		Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		√	Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang			Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI			
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)			
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)			Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		√	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		√	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrual?			Ya
	Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		√	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)		√	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			

	Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		√	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
	Pengecekan Pos-pos Neraca	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 2024 di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	√		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	√		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	√		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
	Pengecekan Pos-pos LO	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN		√	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		√	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
	Pengecekan Pos-pos LPE	Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas				
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?			Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)			Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
	Pengecekan Pos-pos LRA/B/P	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak
4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	√		Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	√		Ya

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun : - Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca) - Beban Penyisihan Piutang (di LO) - Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang		√	Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun : - Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		√	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun : - Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun : - Akumulasi AT/AL (Neraca) - Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrual? Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	√	√	Ya/Tidak Ya
Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ? Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas		√	Ya/Tidak Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ? Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas		√	Ya/Tidak Ya
Pengecekan Jurnal Manual Akrual pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus Ditatausahakan)		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrual		√	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X) - Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrual	√	√	Ya/Tidak Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrual		√	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) - Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrual	√	√	Ya/Tidak Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrual	√		Ya/Tidak
TELAAH LK BLU				
LPSAL BLU		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?			Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?			Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?			Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?			Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA			Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?			Ya
LAK BLU		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrual BLU?			Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?			Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca			Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU			Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca			Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca			Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU			Ya
LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN				
"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Mengetahui Pejabat Penyusun ,</p>  <p>Rizal Mutaqin, SE. MM. NIP. 19760521.200502.1.001</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p>Jakarta, 05 Mei 2025 Penelaah,</p>  <p>Restiana Irwanti NIP.19870319.200904.2.001</p> </div> </div>				



Jakarta, 05 Mei 2025
Penelaah,

Restiana Irwanti
NIP.19870319.200904.2.001

**KARTU RINCIAN BELANJA BARANG DIBAYAR DIMUKA
PER 31 DESEMBER 2025**

BA : (005) Mahkamah Agung
 Eselon I : (01) Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : (0100) DKI Jakarta
 Satuan Kerja : (401112) Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

NO	URAIAN BELANJA	NILAI TAGIHAN	LAMA MANFAAT (Bulan)	MAANFAAT PERBULAN	TANGGAL MULAI SEWA	TANGGAL BERAKHIR SEWA	MANFAAT YANG TELAH TERPAKAI S.d. 31 Des 2025 (bulan)	MANFAAT YANG TELAH TERPAKAI S.d. 31 Des 2025 (Rupiah)	BEBAN DIBAYAR DIMUKA
1	Langanan Canva Pro	769,000	12	64,083	5/18/2025	5/17/2026	7	448,583	320,417
2	Google Drive (Keuangan)	81,030	12	6,753	2/13/2025	2/12/2026	11	74,278	6,753
3	Google Drive (ptadkijakarta)	477,300	12	39,775	3/15/2025	3/14/2026	10	397,750	79,550
4	Google Drive (dokumen.kepeg)	136,530	12	11,378	11/26/2025	11/25/2026	1	11,377	125,153
TOTAL									531,872

Jakarta, 18 Januari 2026
 Kabag Umum dan Keuangan



Rizal Mutiqin, SE. MM.
 NIP. 19760521.200502.1.001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

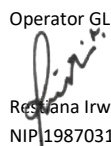
Kementerian Negara/Lembaga : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
 Eselon : 01 UNIT ESELON I BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Wilayah : 0100 DKI JAKARTA
 Satuan Kerja : 401112 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
 No. Dokumen : 001 s/d 004
 Tanggal : 31 Desember 2025
 Tahun Anggaran : 2025
 Keterangan : Belanja Yang Dibayar Di Muka per 31 Desember 2025

Kategori Jurnal Penyesuaian

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima Dimuka | <input type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban |
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus Diterima | <input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| <input checked="" type="checkbox"/> Belanja Dibayar Di Muka | <input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| <input type="checkbox"/> Belanja Yang Masih Harus Dibayar | <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang |
| <input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang | <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek |
| <input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang | <input type="checkbox"/> Transfer Masuk |
| <input type="checkbox"/> Penyusutan Aset | <input type="checkbox"/> Transfer Keluar |
| <input type="checkbox"/> Kas Di Bendaharan Penerimaan | <input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca |
| <input type="checkbox"/> Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran | <input type="checkbox"/> Koreksi |
| <input type="checkbox"/> Persediaan | <input type="checkbox"/> |

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	320.417	
	K	521111	Beban Keperluan Perkantoran		320.417
2	D	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	6.753	
	K	521111	Beban Keperluan Perkantoran		6.753
3	D	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	79.550	
	K	521111	Beban Keperluan Perkantoran		79.550
4	D	114112	Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	125.153	
	K	521111	Beban Keperluan Perkantoran		125.153


 Disetujui oleh :
 Tanggal :
 Kabag Umum dan Keuangan
 Rizki Mutakin, SE. MM.
 NIP. 19760521200502.1.001

Direkam oleh
 Tanggal :
 Operator GLP

 Resnana Irwanti
 NIP. 19870319.200904.2.001

Atas Memo Penyesuaian tersebut di atas, Petugas Akuntansi Satker menginput pada aplikasi SAKTI pada menu Jurnal Penyesuaian Khusus Kategori 4 "Beban Yang Masih Harus Dibayar".

**DAFTAR PERHITUNGAN PIUTANG BUKAN PAJAK DAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH PIUTANG PNBP
Per 31 Desember 2025**

BA : (005) Mahkamah Agung
 Eselon I : (01) Badan Urusan Administrasi
 Wilayah : (0100) DKI Jakarta
 Satuan Kerja : (401112) Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

No.	Nama Debitur	Uraian	Piutang PNBP	Nilai Agunan/ Sitaan Yang Diperhitungkan	Saldo Piutang Setelah Agunan/ Sitaan	Penyisihan Piutang				Jumlah Saldo Akhir	Ket
						0.5% (lancar)	10% (Kurang Lancar)	50% (Diragukan)	100% (Macet)		
1	Drs. JUWAINI, S.H., M.H.	Kekurangan Pembayaran Sewa Rumah Dinas Ketua PA Jakarta Selatan Bulan Juni 2024	132.453	-	-	662	-	-	-	-	Sudah Lunas Di Tahun 2025 Namun Belum Dilakukan Penyisihan
2	Dr. SULTAN, S.Ag., S.H., M.H.	Kekurangan Pembayaran Sewa Rumah Dinas Wakil Ketua PA Jakarta Selatan Bulan Juni 2024	132.453	-	-	662	-	-	-	-	Sudah Lunas Di Tahun 2025 Namun Belum Dilakukan Penyisihan
Total			264.906			1.324		-	-	-	



Jakarta, 18 Januari 2026
 Kabag Umum dan Keuangan

Rizal Mutaqin, SE. MM.
 NIP. 19760521.200502.1.001

FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

Kementerian Negara/Lembaga	: 005	MAHKAMAH AGUNG RI
Eselon	: 01	UNIT ESELON I BADAN URUSAN ADMINISTRASI
Wilayah	: 0100	DKI JAKARTA
Satuan Kerja	: 401112	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
No. Dokumen	: 009	
Tanggal	: 31 Desember 2025	
Tahun Anggaran	: 2025	
Keterangan	: Penyisihan Piutang Tahun 2025	

Kategori Jurnal Penyesuaian


- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima Dimuka | <input type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban |
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus Diterima | <input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| <input type="checkbox"/> Belanja Dibayar Di Muka | <input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| <input type="checkbox"/> Belanja Yang Masih Harus Dibayar | <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang |
| <input checked="" type="checkbox"/> Penyisihan Piutang | <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek |
| <input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang | <input type="checkbox"/> Transfer Masuk |
| <input type="checkbox"/> Penyusutan Aset | <input type="checkbox"/> Transfer Keluar |
| <input type="checkbox"/> Kas Di Bendaharan Penerimaan | <input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca |
| <input type="checkbox"/> Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran | <input type="checkbox"/> Koreksi |
| <input type="checkbox"/> Persediaan | <input type="checkbox"/> |

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	116211	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	1.324	
	K	594211	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang PNB		1.324

Disetujui oleh :
 Tanggal :
 Kabag Umum dan Keuangan
 Rizal Mutakin, SE. MM.
 NIP. 19760521.200502.1.001



Direkam oleh
 Tanggal :
 Operator GLP
 Restiana Irwanti
 NIP. 19870319.200904.2.001



Atas Memo Penyesuaian tersebut di atas, Petugas Akuntansi Satker menginput pada aplikasi SAKTI pada menu Jurnal Penyesuaian Khusus Kategori 4 "Beban Yang Masih Harus Dibayar".

KARTU RINCIAN NILAI UTANG KEPADA PIHAK KETIGA (BELANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR)**per 31 DESEMBER 2025**

K/L : (005) Mahkamah Agung
BAES1 : (01) Badan Urusan Administrasi
Wilayah : (0100) DKI Jakarta
Satuan Kerja : (401112) Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta

No	KODE WILAYAH	WILAYAH	KODE SATKER	SATKER	TA	AKUN	URAIAN	BELANJA YANG MASIH HARUS DIBAYAR	DOKUMEN SUMBER	KETERANGAN
1	0100	DKI Jakarta	401112	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	2025	511628	Belanja Uang Makan PPPK Bulan Desember 2025	12,347,000	SPM NO: 00008A TANGGAL 08-01-2025	
2	0100	DKI Jakarta	401112	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	2025	511129	Belanja Uang Makan PNS Bulan Desember 2025	56,447,000	SPM NO: 00007A TANGGAL 08-01-2025	
3	0100	DKI Jakarta	401112	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	2025	522112	Pembayaran belanja barang berupa tagihan telepon bulan Januari 2026	1,791,319	SPM NO: 000011A TANGGAL 09-01-2025	
4	0100	DKI Jakarta	401112	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	2025	522111	Pembayaran Listrik bulan Januari 2026	20,124,558	Tagihan Listrik Bulan Januari 2025	
5	0101	DKI Jakarta	401112	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	2025	522113	Pembayaran Air bulan Januari 2026	1,320,760	Tagihan Air Bulan Januari 2025	
6	0101	DKI Jakarta	401112	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	2025	511339	Belanja Tunjangan penghasilan pejabat negara	2,303,100,000	Perhitungan Gaji Web	
7	0101	DKI Jakarta	401112	Pengadilan Tinggi Agama Jakarta	2025	511324	Belanja Tunjangan PPH Pejabat Negara	695,217,588	Perhitungan Gaji Web	
JUMLAH TOTAL								3,090,348,225		

Jakarta, 18 Januari 2026
Kabag Urum dan Keuangan
Rizal Mutaqin, SE. MM.
NPE 19760521-200502.1.001



FORMULIR MEMO PENYESUAIAN

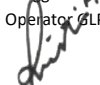
Kementerian Negara/Lembaga : 005 MAHKAMAH AGUNG RI
 Eselon : 01 UNIT ESELON I BADAN URUSAN ADMINISTRASI
 Wilayah : 0100 DKI JAKARTA
 Satuan Kerja : 401112 Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
 No. Dokumen : 005 s/d 009, 010, 011
 Tanggal : 31 Desember 2025
 Tahun Anggaran : 2025
 Keterangan : Belanja Yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2025

Kategori Jurnal Penyesuaian

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Diterima Dimuka | <input type="checkbox"/> Koreksi Antar Beban |
| <input type="checkbox"/> Pendapatan Yang Masih Harus Diterima | <input type="checkbox"/> Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| <input type="checkbox"/> Belanja Dibayar Di Muka | <input type="checkbox"/> Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi |
| <input checked="" type="checkbox"/> Belanja Yang Masih Harus Dibayar | <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Panjang |
| <input type="checkbox"/> Penyisihan Piutang | <input type="checkbox"/> Pembentukan Piutang Jangka Pendek |
| <input type="checkbox"/> Penghapusan Piutang | <input type="checkbox"/> Transfer Masuk |
| <input type="checkbox"/> Penyusutan Aset | <input type="checkbox"/> Transfer Keluar |
| <input type="checkbox"/> Kas Di Bendaharan Penerimaan | <input type="checkbox"/> Reklasifikasi Neraca |
| <input type="checkbox"/> Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran | <input type="checkbox"/> Koreksi |
| <input type="checkbox"/> Persediaan | <input type="checkbox"/> |

No	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	511129	Belanja Uang Makan PNS	12,347,000	
	K	212111	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar		12,347,000
2	D	511628	Belanja Uang Makan PPPK	56,447,000	
	K	212111	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar		56,447,000
3	D	522112	Belanja Langganan Telepon	1,791,319	
	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		1,791,319
4	D	522112	Belanja Langganan Listrik	20,124,558	
	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		20,124,558
5	D	522113	Belanja Langganan Air	1,320,760	
	K	212112	Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar		1,320,760
6	D	511339	Belanja Tunjangan penghasilan pejabat negara	2,303,100,000	
	K	212111	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar		2,303,100,000
7	D	511324	Belanja Tunjangan PPH Pejabat Negara	695,217,588	
	K	212111	Belanja Pegawai Yang Masih Harus Dibayar		695,217,588



Direkam oleh
 Tanggal :
 Operator :

 Resjiana Irwanti
 NIP. 19870319.200904.2.001

Atas Memo Penyesuaian tersebut di atas, Petugas Akuntansi Satker menginput pada aplikasi SAKTI pada menu Jurnal Penyesuaian Khusus Kategori 4 "Beban Yang Masih Harus Dibayar".